

**LAPORAN**  
**SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**  
**TRIWULAN II TAHUN 2023**  
**(Periode Survei: April – Juni)**



**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**  
**2023**

---

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN**  
**SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**  
**TRIWULAN II TAHUN 2023**  
**(Periode Survei: April – Juni)**

**Disahkan di Surabaya**  
**Pada Hari Kamis, Tanggal 6 September 2023**

**Ketua Pengadilan Tinggi**  
**Tata Usaha Negara Surabaya,**

  
*Dr. Istiwibowo*

**Dr. Istiwibowo, S.H., M.H.**  
**NIP. 19571011 198503 1 001**

**Koordinator Tim Survei,**

*Rini Setiawati*

**Rini Setiawati, S.E.**  
**NIP. 19750929 200604 2 002**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR DIAGRAM .....	v
<b>BAB I KUISIONER SURVEI .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Survei .....	1
C. Ruang Lingkup Survei.....	2
<b>BAB II METODOLOGI SURVEI.....</b>	<b>4</b>
A. Kriteria Responden.....	4
B. Metode Pencacahan .....	4
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis.....	5
1. Pengolahan Data .....	5
2. Analisis Data.....	6
<b>BAB III PENGOLAHAN SURVEI.....</b>	<b>7</b>
A. Analisis Hasil Survei.....	7
1. Jenis Kelamin .....	7
2. Usia .....	7
3. Pendidikan.....	8
4. Pekerjaan .....	9
5. Jenis Pelayanan .....	10
B. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) .....	11
C. Tindak Lanjut Hasil Survei .....	18
<b>BAB IV DATA SURVEI .....</b>	<b>19</b>
A. Data Responden .....	19
B. Keputusan Pembentukan Tim Survei .....	21

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kategori Mutu dan Kinerja Anti Korupsi .....	5
Tabel 2.	Jenis Kelamin Responden SPAK .....	7
Tabel 3.	Usia Responden SPAK .....	7
Tabel 4.	Pendidikan Responden SPAK .....	8
Tabel 5.	Pekerjaan Responden SPAK .....	9
Tabel 6.	Jenis Pelayanan yang Diterima Responden SPAK .....	10
Tabel 7.	Data Penghitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi .....	11
Tabel 8.	Kategori Nilai Persepsi Setiap Unsur Kuisisioner SPAK .....	11
Tabel 9.	Jumlah dan Persentase Nilai pada Pernyataan 1 dalam Kuisisioner SPAK .....	12
Tabel 10.	Jumlah dan Persentase Nilai pada Pernyataan 2 dalam Kuisisioner SPAK .....	14
Tabel 11.	Jumlah dan Persentase Nilai pada Pernyataan 3 dalam Kuisisioner SPAK .....	15
Tabel 12.	Jumlah dan Persentase Nilai pada Pernyataan 4 dalam Kuisisioner SPAK .....	16
Tabel 13.	Jumlah dan Persentase Nilai pada Pernyataan 5 dalam Kuisisioner SPAK .....	17
Tabel 14.	Data Kuisisioner Isian Responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) .....	19

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.	Jenis Kelamin Responden SPAK .....	7
Diagram 2.	Rentang Usia Responden SPAK .....	8
Diagram 3.	Tingkat Pendidikan Responden SPAK .....	9
Diagram 4.	Pekerjaan Responden SPAK .....	10
Diagram 5.	Jenis Pelayanan yang Diterima Responden SPAK .....	10
Diagram 6.	Nilai Persepsi Setiap Pernyataan Kuisisioner .....	12
Diagram 7.	Rata-Rata Nilai pada Pernyataan 1 dalam Kuisisioner SPAK .....	12
Diagram 8.	Rata-Rata Nilai pada Pernyataan 2 dalam Kuisisioner SPAK .....	13
Diagram 9.	Rata-Rata Nilai pada Pernyataan 3 dalam Kuisisioner SPAK .....	15
Diagram 10.	Rata-Rata Nilai pada Pernyataan 4 dalam Kuisisioner SPAK .....	16
Diagram 11.	Rata-Rata Nilai pada Pernyataan 5 dalam Kuisisioner SPAK .....	17

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kami melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat persepsi pengguna layanan terhadap kondisi anti korupsi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sekaligus untuk mengetahui kekurangan dan potensi perlunya perbaikan dalam pelayanan.

Survei dilakukan dengan mengirimkan kuesioner kepada para pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, melalui alamat *Uniform Resource Locator* (URL). Kuesioner tersebut berisi pertanyaan tentang perlakuan diskriminatif, layanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan, penerimaan atau permintaan imbalan di luar ketentuan, praktik pungutan liar, dan percaloan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Dalam laporan ini, kami akan memaparkan hasil survei dan analisisnya, termasuk rekomendasi tindak lanjut terhadap data yang diperoleh.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi yaitu kualitas persepsi korupsi dapat dijelaskan dan/atau diukur dengan membandingkan persepsi korupsi yang diterima dengan yang diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam penerimaan layanan dan anggapan terhadap anti korupsi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang dihimpun melalui kuesioner.

Kami berterima kasih kepada seluruh responden yang telah memberikan waktu dan partisipasinya dalam survei ini. Tanpa dukungan dari para responden, survei ini tidak akan terlaksana dengan baik. Sekian kata pengantar dari kami, semoga laporan ini bermanfaat bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan masyarakat luas.

Surabaya, 31 Agustus 2023

Hormat kami,

Ttd.

Tim Survei

# BAB I

## KUISIONER SURVEI

### A. Latar Belakang

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai salah satu satuan kerja Mahkamah Agung selaku Instansi Pemerintah, menjadi bagian dari Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi Birokrasi diarahkan pada 3 (tiga) kondisi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan untuk memberikan pelayanan yang optimal.

Tugas pokok Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat banding adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Tingkat keberhasilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya salah satunya ditentukan oleh tingkat kepuasan pengguna layanan di pengadilan. Salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan melakukan evaluasi melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) guna menilai persepsi masyarakat terhadap implementasi komitmen Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam mewujudkan Wilayah yang Bersih dari Korupsi.

Hasil dari Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) tersebut akan menjadi masukan penting bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, hasil survei tersebut juga dapat membantu pengadilan memperbaiki sistem dan prosedur pelayanan yang ada, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan profesionalisme Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

### B. Tujuan Survei

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Mengetahui tingkat persepsi masyarakat terhadap korupsi di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;

3. Menilai efektivitas program dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi;
4. Membantu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam menyusun strategi dan program aksi lanjutan untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas institusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi.

### C. Ruang Lingkup Survei

Ruang lingkup Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya meliputi metode survei, pelaksanaan dan teknik survei, penyusunan kuesioner, pelaksanaan survei, pengolahan data, analisis hasil survei, pelaporan hasil survei, dan rencana tindak lanjut.

Tujuan utama Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah untuk mengukur tingkat persepsi dan pemahaman terhadap anti-korupsi di kalangan pengguna layanan terkait kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Hasil survei ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan pengadilan dalam mencegah dan memberantas tindak korupsi.

Selain itu, hasil survei juga dapat digunakan sebagai masukan bagi lembaga anti korupsi dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan strategi dalam mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan pengadilan. Responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap pernyataan kuesioner yang terkait dengan empat unit layanan yang salah satunya telah diterima pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Keempat unit layanan tersebut, yaitu:

1. Penyelesaian Perkara (Pelayanan Gugatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pelayanan Administrasi Banding, Pelayanan Upaya Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama);
2. Pengambilan Produk Pengadilan (Pelayanan Salinan Putusan, Pelayanan Surat Kuasa, Pelayanan Izin Penelitian dan Riset);
3. Informasi dan Pengaduan (Permohonan Informasi, Penanganan Pengaduan);
4. Pembinaan dan Pengawasan (Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Kompetensi).

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengajukan pernyataan dalam kuesioner untuk dinilai oleh responden, sebagai berikut:

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini.

**Info:** Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor (suku, agama, kekerabatan, almameter, dan sejenisnya).

2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini.



**Info:** Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyebortan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.

3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini.

**Info:** Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, dll. di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll. diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, *resort* perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, *voucher* belanja, dll.) diluar ketentuan.

4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini.

**Info:** Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terimakasih”, dsb).

5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini.

**Info:** Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai.

Teknik pengumpulan data atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam survei ini adalah dengan cara survei *online*, yaitu Responden diminta untuk mengisi kuesioner secara *online* melalui *browser* pada perangkat pintarnya (*personal computer* atau *smart phone*) dengan menggunakan data internet. Teknik ini dapat menghemat waktu dan biaya, serta memungkinkan pengumpulan data yang lebih cepat dan mudah. Kuisisioner Survei tersebut disajikan dalam situs web Google Formulir (<https://docs.google.com/forms/>), dan formulir kuisisionernya dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/surveipttunsurabaya>.

## BAB II METODOLOGI SURVEI

### A. Kriteria Responden

Subjek yang dijadikan sebagai populasi untuk menentukan sampel pada Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya periode Triwulan II (April-Juni) Tahun 2023 ini, merupakan penerima layanan yang telah selesai menerima salah satu dari 4 (empat) jenis layanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang disebutkan pada BAB sebelumnya. Kriteria responden yang digunakan dalam survei ini diambil secara acak dari pengguna layanan. Selain itu, kriteria responden yang diambil ini mencakup variasi yang cukup beragam dari karakteristik masyarakat, seperti usia, jenis kelamin, dan lain-lain, untuk memastikan bahwa hasil survei dapat mewakili/merepresentasikan seluruh pengguna layanan dengan baik.

### B. Metode Pencacahan

Pencacahan dilakukan untuk mendapatkan hasil Survei yang menggambarkan penilaian Responden secara umum yang diisi dalam Kuisisioner. Rentang Persepsi yang dihasilkan, yaitu antara 1 (satu) s.d. 4 (empat). Semakin rendah hasil penilaian yang diberikan oleh Responden, berarti semakin rendah juga Persepsi Responden terhadap Anti Korupsi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Demikian juga sebaliknya, semakin tinggi hasil penilaian yang diberikan Responden, maka semakin tinggi juga Persepsi Responden terhadap Anti Korupsi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Pelaksanaan survei dilakukan pada rentang waktu tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 27 Juni 2023. Metode pencacahan yang digunakan adalah secara *online*, di mana responden yang telah menerima layanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya diberikan alamat URL <https://bit.ly/surveipttunsurabaya>. Alamat URL ini akan digunakan untuk mengisi formulir survei. Dalam hal ini, responden dapat mengisi survei di mana saja selama mereka memiliki akses internet dan perangkat yang diperlukan, seperti komputer atau ponsel pintar.

Teknik yang digunakan dalam pemilihan responden survei ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian atau survei yang dilakukan. Dalam hal ini, responden dipilih berdasarkan dua kriteria tertentu, yaitu pengguna layanan yang telah menggunakan layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam jangka waktu 3 bulan terakhir dan pengguna layanan yang pernah memberikan masukan atau keluhan terhadap layanan tersebut. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, diharapkan responden yang dipilih dapat memberikan informasi yang relevan dengan tujuan survei yang dilakukan.

### C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

#### 1. Pengolahan Data

Setiap responden diminta untuk mengisi kuesioner mengenai data karakteristik dan memilih jenis layanan. Setelah itu, responden diminta untuk menilai 5 (lima) pernyataan kuesioner yang telah disusun. Setiap pernyataan kuesioner memiliki nilai 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), dengan penjelasan penilaian sebagai berikut:

NO.	JAWABAN	NILAI
1.	Sangat Setuju Sekali	6 (Enam)
2.	Sangat Setuju	5 (Lima)
3.	Setuju	4 (Empat)
4.	Kurang Setuju	3 (Tiga)
5.	Tidak Setuju	2 (Dua)
6.	Sangat Tidak Setuju	1 (Satu)

Untuk mendapatkan tingkat persepsi responden, setiap nilai yang dipilih oleh Responden pada setiap unsur penilaian dalam kuisisioner Survei Persepsi Anti Korupsi dijumlahkan. Setelah didapatkan jumlahnya, maka selanjutnya diterapkan rumus untuk mendapatkan Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsinya. Rumus yang diterapkan, yaitu total jumlah nilai dibagi (:) jumlah Responden yang telah dikali (x) 30 (tiga puluh), kemudian dikali (x) 4 (empat), [Nilai IPAK =  $\frac{\text{Total Jumlah Nilai}}{(\text{Jumlah Responden} \times 30)} \times 4$ ]. Sedangkan untuk mengetahui persentasenya, maka diterapkan rumus Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dibagi 4 (empat), kemudian dikali 100 ( $\frac{\text{Nilai IPAK}}{4} \times 100$ ).

Hasil yang diperoleh berdasarkan penghitungan Nilai IPAK tersebut merupakan nilai antara 1 (satu) s/d 4 (empat), dan masing-masing Nilainya merepresentasikan Mutu dan Kinerja Anti Korupsi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang digambarkan melalui tabel, sebagai berikut:

**Tabel 1. Kategori Mutu dan Kinerja Anti Korupsi**

NO.	NILAI IPAK	PERSENTASE	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 2.25996	25 - 64,99	(D) Tidak Baik	Tidak Bersih dari Korupsi
2	2.60 – 3.04	65.00 – 76.60	(C) Kurang Baik	Kurang Bersih dari korupsi
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	(B) Baik	Cukup bersih dari Korupsi
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	(A) Sangat Baik	Bersih dari Korupsi

## 2. Analisis Data

Setelah diperoleh hasil pengolahan data SPAK, maka perlu dilakukan analisa terhadap unsur yang disurvei, sehingga akan menggambarkan hasil yang objektif dari survei tersebut. Analisa masing-masing unsur SPAK dilakukan dengan cara *Analisis Univariat*. *Analisis Univariat* digunakan untuk menggambarkan data variabel yang terkumpul dengan menguraikan hasil temuan dari data yang diperoleh dalam kuisisioner. Hasil analisa ini merupakan diskripsi (penjabaran) temuan hasil survei berupa data statistik, seperti tabulasi data dan persentase yang diwujudkan dalam grafik atau diagram serta deskripsi dari hasil masing-masing unsur yang disurvei.

## BAB III PENGOLAHAN SURVEI

### A. Analisis Hasil Survei

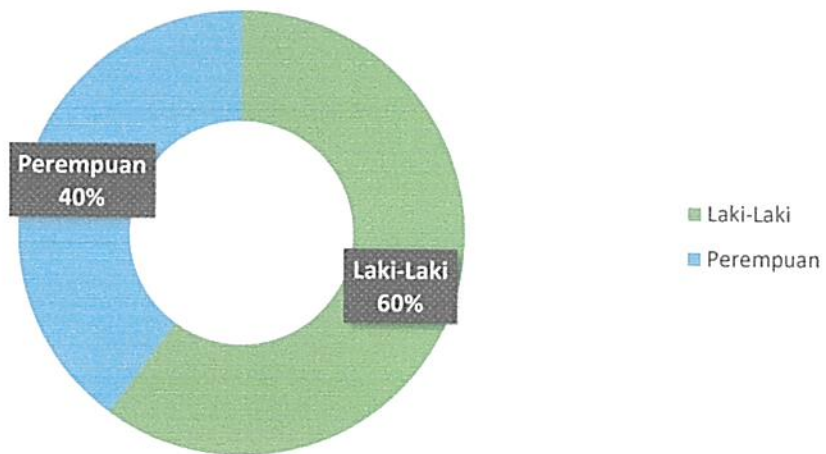
Teknik analisis data Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menggunakan Statistik Deskriptif yaitu digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang didapatkan dari pengisian kuisisioner.

#### 1. Jenis Kelamin

**Tabel 2. Jenis Kelamin Responden SPAK**

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	3	60
2.	Perempuan	2	40
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>100</b>

**Diagram 1. Jenis Kelamin Responden SPAK**



Tabel 2 tersebut menunjukkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, dan dapat dilakukan analisis data hasil survey, yaitu proporsi responden pada survei ini terdiri dari 60% Laki-laki dan 30% Perempuan. Hal ini dapat digunakan untuk memahami kecenderungan identitas pengguna layanan yang menggunakan layanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

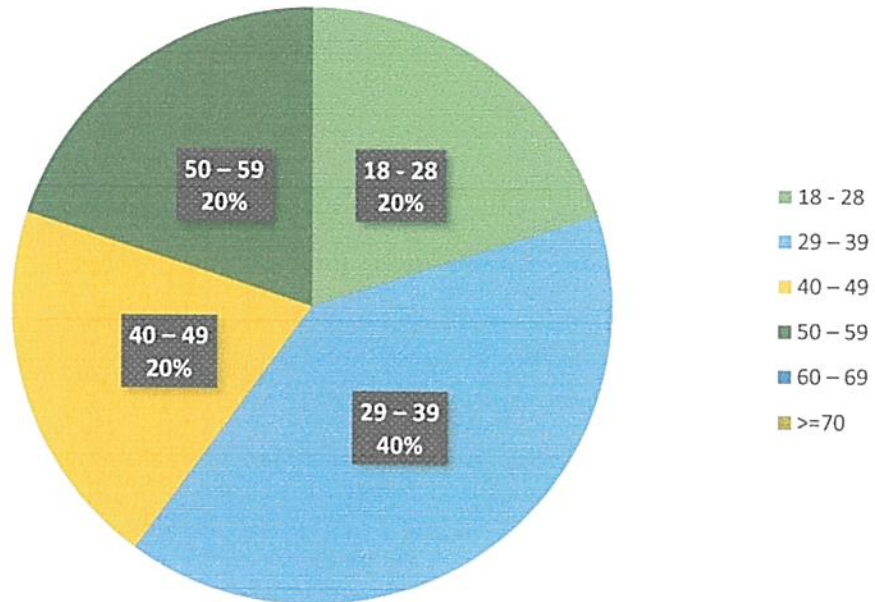
#### 2. Usia

**Tabel 3. Usia Responden SPAK**

No.	Rentang Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1.	18 - 28	1	20
2.	29 - 39	2	40
3.	40 - 49	1	20

4.	50 – 59	1	20
5.	60 – 69	0	0
6.	>=70	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>100</b>

**Diagram 2. Rentang Usia Responden SPAK**



Persentase jumlah responden dengan rentang usia 29-39 tahun menjadi yang tertinggi dengan jumlah 2 orang atau 40% dari jumlah total seluruh responden SPAK. Disusul dengan responden dengan rentang usia 18-28 tahun, 40-49 tahun, dan 50-59 tahun yang masing-masing sebanyak 20% dari jumlah total seluruh responden, dan tidak ada responden dengan rentang usia lebih dari 60 tahun.

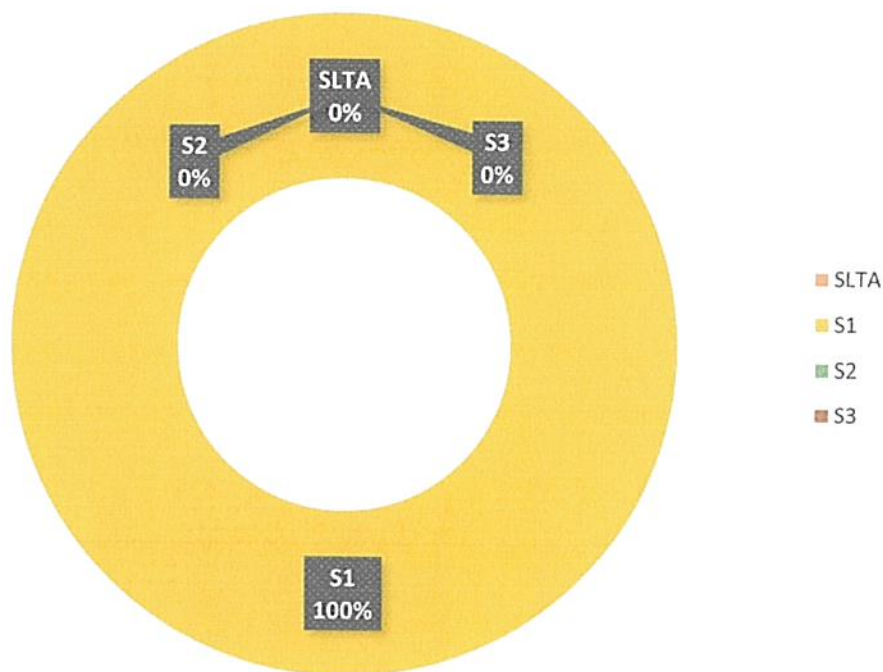
Hasil analisis ini dapat membantu pengelola layanan untuk lebih memahami preferensi dan kebutuhan pengguna layanan di berbagai rentang usia, serta membantu pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas layanan yang disesuaikan dengan karakteristik usia responden.

### 3. Pendidikan

**Tabel 4. Pendidikan Responden SPAK**

No.	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	SLTA	0	0
2.	S1	5	100
3.	S2	0	0
4.	S3	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>100</b>

**Diagram 3. Tingkat Pendidikan Responden SPAK**



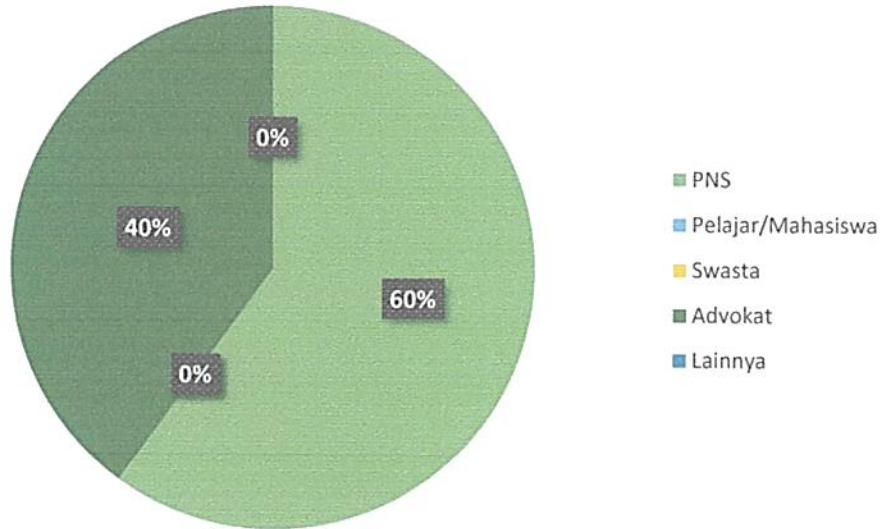
Pendidikan yang ditempuh masing-masing Responden adalah Strata I (S1). Analisis ini menunjukkan bahwa seluruh responden berpendidikan tinggi, sehingga dapat diasumsikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup terhadap layanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan keakuratan tanggapan yang diberikan oleh responden dalam survei.

**4. Pekerjaan**

**Tabel 5. Pekerjaan Responden SPAK**

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	PNS/ASN	3	60
2.	Pelajar/Mahasiswa	0	0
3.	Swasta	0	0
4.	Advokat	2	40
5.	Lainnya	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>100</b>

**Diagram 4. Pekerjaan Responden SPAK**



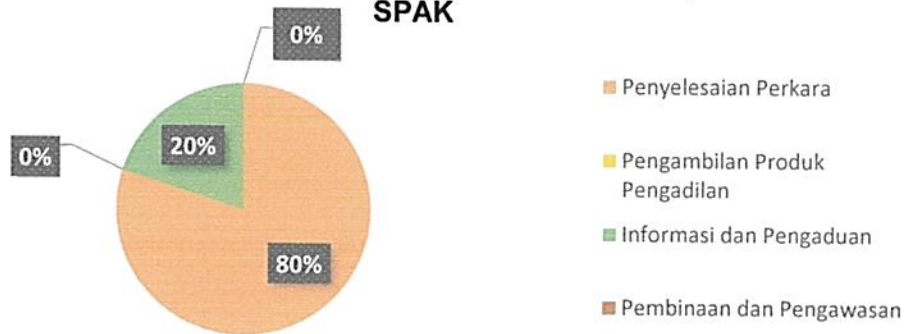
Selain itu, dalam hal profesi/pekerjaan, 3 (tiga) atau 60% Responden bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 2 (dua) atau 40% diantaranya sebagai Advokat. Hal ini dapat memberikan gambaran kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tentang profil responden dalam hal pekerjaan, sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan responden.

**5. Jenis Pelayanan**

**Tabel 6. Jenis Pelayanan yang Diterima Responden SPAK**

No.	Jenis Pelayanan yang Diterima	Frekuensi	(%)
1.	Penyelesaian Perkara	4	80
2.	Pengambilan Produk Pengadilan	0	0
3.	Informasi dan Pengaduan	1	20
4.	Pembinaan dan Pengawasan	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>100</b>

**Diagram 5. Jenis Pelayanan yang Diterima Responden SPAK**



Tabel 6 menyajikan data mengenai jenis layanan yang disediakan dan jumlah frekuensi serta persentase penggunaan layanan oleh responden.



Sebanyak 4 (empat) atau 80% Responden telah menerima Pelayanan Penyelesaian Perkara, dan 1 (satu) atau 20% Responden menerima Pelayanan Informasi dan Pengaduan.

#### B. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Berdasarkan hasil penghitungan terhadap nilai yang diberikan oleh responden dalam setiap unsur pernyataan pada kuisisioner Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), diketahui bahwa Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah 3,76 dengan capaian persentase 94% dan masuk pada kategori Mutu A (Sangat Baik), yang berarti Bersih dari Korupsi. Berikut ini merupakan Tabel yang menunjukkan dasar perolehan hasil tersebut:

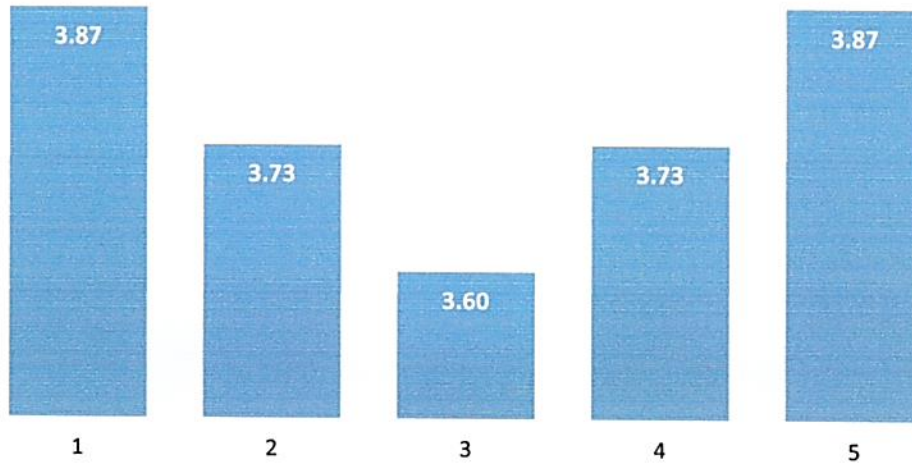
**Tabel 7. Data Penghitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi**

RESPONDEN (R)	JUMLAH NILAI (★) SETIAP UNSUR					JUMLAH	RATA-RATA
	1	2	3	4	5		
R 1	6	6	5	6	6	29	5,8
R 2	6	6	6	6	6	30	6
R 3	6	6	6	6	6	30	6
R 4	6	6	6	6	6	30	6
R 5	5	4	4	4	5	22	4,4
JUMLAH	29	28	27	28	29	141	28,2
RATA-RATA	5,8	5,6	5,4	5,6	5,8	28,2	5,64
SKALA 1-4	3,87	3,73	3,6	3,73	3,87	18,8	3,76
PERSENTASE	96,75	93,25	90	93,25	96,75	470	94
<b>NILAI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)</b>							<b>3,76</b>
<b>PERSENTASE NILAI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)</b>							<b>94</b>

**Tabel 8. Kategori Nilai Persepsi Setiap Unsur Kuisisioner SPAK**

NO.	PERNYATAAN KUISISIONER	NILAI SKALA 1-4	%	KATEGORI
1.	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini.	3,87	96,75	(A) Sangat Baik
2.	Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini.	3,73	93,25	(A) Sangat Baik
3.	Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini.	3,6	90	(A) Sangat Baik
4.	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini.	3,73	93,25	(A) Sangat Baik
5.	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini.	3,87	96,75	(A) Sangat Baik

**Diagram 6. Nilai Persepsi Setiap Pernyataan Kuisisioner**

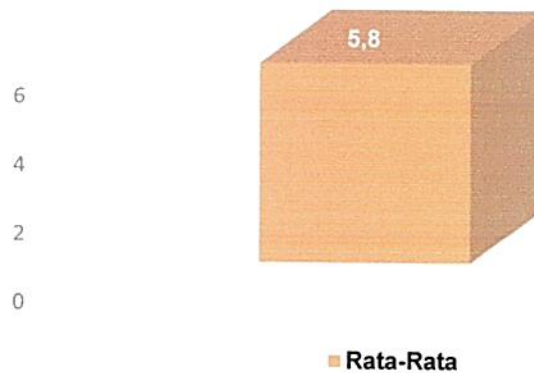


Analisis data hasil Nilai IPAK untuk setiap pernyataan kuisisioner didiskripsikan sebagai berikut:

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini.

**Info:** Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor (suku, agama, kekerabatan, almameter, dan sejenisnya).

**Diagram 7. Rata-Rata Nilai pada Pernyataan 1 dalam Kuisisioner SPAK**



**Tabel 9. Jumlah dan Persentase Nilai pada Pernyataan 1 dalam Kuisisioner SPAK**

NILAI	JUMLAH	PERSENTASE
Sangat Tidak Setuju	0	0,00%
Tidak Setuju	0	0,00%
Kurang Setuju	0	0,00%
Setuju	0	0,00%
Sangat Setuju	1	20,00%
Sangat Setuju Sekali	4	80,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>

<b>RATA-RATA NILAI</b>	<b>5,8</b>
------------------------	------------

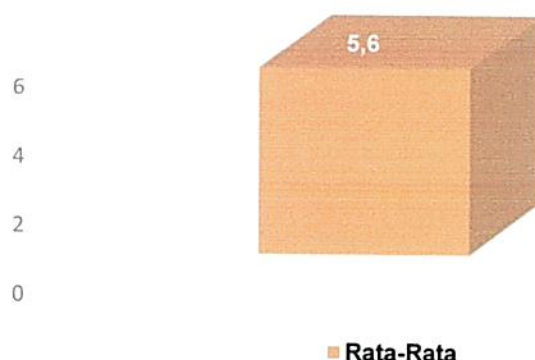
Tingkat Persepsi Anti Korupsi pada unsur tidak adanya diskriminasi pelayanan ini berada pada angka **3,87** dari interval 1-4 yang berarti masuk pada kategori **A (Sangat Baik)** dengan kinerja **Bersih dari Korupsi**. Berdasarkan Tabel 9 tersebut, dapat dicermati bahwa mayoritas responden (80% atau 4 responden) memberikan nilai 6 pada pernyataan "Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini". Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sebagai pengguna layanan menganggap bahwa Petugas Layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memberikan layanan tidak membedakan berdasarkan faktor identitas tertentu yang bersifat subjektif. Terdapat juga 1 (20%) responden yang memberikan Nilai 5, yang dapat diartikan bahwa aspek kesamaan perlakuan terhadap pengguna layanan masih perlu ditingkatkan.

Secara umum, hasil penilaian responden pada Pernyataan Pertama dalam Kuisisioner SPAK tersebut sudah Sangat Baik, akan tetapi harus tetap ditingkatkan karena masih terdapat 1 responden yang belum memberikan nilai maksimal pada aspek diskriminasi pelayanan ini.

2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur atau kecurangan pelayanan pada unit layanan ini.

**Info:** Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.

**Diagram 8. Rata-Rata Nilai pada Pernyataan 2 dalam Kuisisioner SPAK**



**Tabel 10. Jumlah dan Persentase Nilai pada Pernyataan 2 dalam Kuisisioner SPAK**

NILAI	JUMLAH	PERSENTASE
Sangat Tidak Setuju	0	0,00%
Tidak Setuju	0	0,00%
Kurang Setuju	0	0,00%
Setuju	1	20,00%
Sangat Setuju	0	0,00%
Sangat Setuju Sekali	4	80,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>
<b>RATA-RATA NILAI</b>	<b>5,6</b>	

Tingkat Persepsi Anti Korupsi pada unsur tidak adanya kecurangan pelayanan ini berada pada angka **3,73** dari interval 1-4 yang berarti masuk pada kategori **A (Sangat Baik)** dengan kinerja **Bersih dari Korupsi**. Berdasarkan Tabel 10 tersebut, dapat dicermati bahwa mayoritas responden (80% atau 4 responden) memberikan Nilai 6 pada pernyataan "Tidak ada pelayanan diluar prosedur atau kecurangan pelayanan pada unit layanan ini". Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

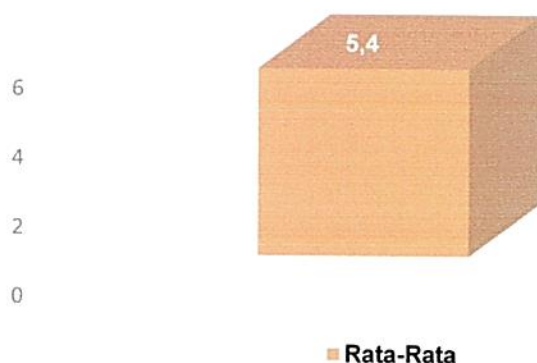
Terdapat 1 (20%) responden yang memberikan Nilai 4, yang mengindikasikan bahwa sebagian kecil responden memberikan penilaian setingkat lebih tinggi dari pertengahan diantara setuju dan tidak setuju bahwa tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Secara umum, hasil penilaian responden pada Pernyataan Kedua dalam Kuisisioner SPAK tersebut sudah Sangat Baik, akan tetapi oleh karena adanya 1 responden yang memberikan penilaian 4 dari 6 pilihan, maka tetap diperlukan evaluasi terhadap unsur terkait dengan ada atau tidak adanya kecurangan pelayanan yang dimaksud.

3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini.

**Info:** Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima atau meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, dll. di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll. diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, *resort* perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, *voucher* belanja, dll.) diluar ketentuan.

**Diagram 9. Rata-Rata Nilai pada Pernyataan 3 dalam Kuisisioner SPAK**



**Tabel 11. Jumlah dan Persentase Nilai pada Pernyataan 3 dalam Kuisisioner SPAK**

NILAI	JUMLAH	PERSENTASE
Sangat Tidak Setuju	0	0,00%
Tidak Setuju	0	0,00%
Kurang Setuju	0	0,00%
Setuju	1	20,00%
Sangat Setuju	1	20,00%
Sangat Setuju Sekali	3	60,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>
<b>RATA-RATA NILAI</b>	<b>5,4</b>	

Tingkat Persepsi Anti Korupsi pada unsur tidak adanya imbalan diluar ketentuan dalam layanan ini berada pada angka 3,6 dari interval 1-4 yang berarti masuk pada kategori **A (Sangat Baik)** dengan kinerja **Bersih dari Korupsi**. Berdasarkan Tabel 11 tersebut, dapat dicermati bahwa mayoritas responden (60% atau 3 responden) memberikan nilai 6 pada pernyataan "Tidak ada penerimaan imbalan uang atau barang dan fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini". Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa tidak ada imbalan atau permintaan imbalan tambahan di luar ketentuan terhadap layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Terdapat 1 (20%) responden yang memberikan Nilai 5, yang dapat diartikan bahwa aspek tidak ada imbalan atau permintaan imbalan tambahan di luar ketentuan terhadap layanan masih tetap perlu ditingkatkan. Kemudian terdapat 1 (20%) responden yang memberikan Nilai 4, yang mengindikasikan bahwa sebagian kecil responden memberikan penilaian satu tingkat di atas pertengahan diantara setuju dan tidak setuju bahwa

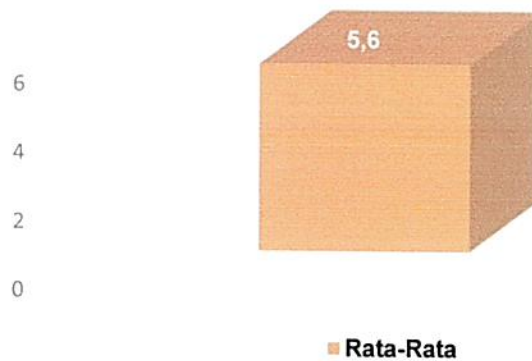
tidak ada imbalan atau permintaan imbalan tambahan di luar ketentuan terhadap layanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Secara umum, hasil penilaian responden pada Pernyataan Ketiga dalam Kuisisioner SPAK tersebut sudah Sangat Baik, akan tetapi oleh karena adanya 2 responden yang belum memberikan penilaian maksimal, maka tetap diperlukan upaya peningkatan terhadap adanya pemberian atau permintaan imbalan tambahan di luar ketentuan terhadap layanan yang dimaksud.

4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini.

**Info:** Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terimakasih”, dsb).

**Diagram 10. Rata-Rata Nilai pada Pernyataan 4 dalam Kuisisioner SPAK**



**Tabel 12. Jumlah dan Persentase Nilai pada Pernyataan 4 dalam Kuisisioner SPAK**

NILAI	JUMLAH	PERSENTASE
Sangat Tidak Setuju	0	0,00%
Tidak Setuju	0	0,00%
Kurang Setuju	0	2,56%
Setuju	1	20,00%
Sangat Setuju	0	0,00%
Sangat Setuju Sekali	4	80,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>
<b>RATA-RATA NILAI</b>	<b>5,6</b>	

Tingkat Persepsi Anti Korupsi pada unsur tidak ada pungutan liar (pungli) pada pelaksanaan pelayanan ini berada pada angka **3,61** dari interval 1-4 yang berarti masuk pada kategori **A (Sangat Baik)** dengan kinerja **Bersih dari Korupsi**. Berdasarkan Tabel 12 tersebut, dapat

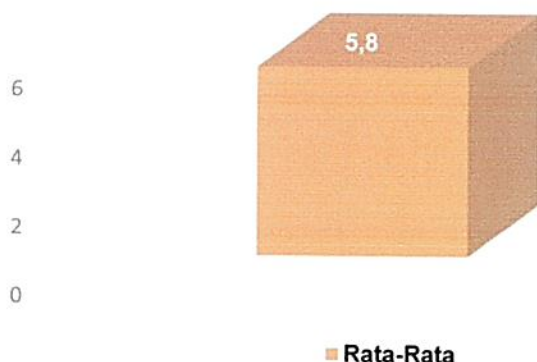
dicermati bahwa mayoritas responden (80% atau 4 responden) memberikan nilai 6 pada pernyataan "Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini". Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa tidak ada pungutan liar (pungli) pada pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Terdapat 1 (20%) responden yang memberikan Nilai 4, yang dapat diartikan bahwa aspek tidak ada pungutan liar (pungli) pada pelaksanaan pelayanan masih tetap perlu ditingkatkan.

Secara umum, hasil penilaian responden pada Pernyataan Keempat dalam Kuisisioner SPAK tersebut sudah Sangat Baik, akan tetapi oleh karena terdapat 1 responden yang memberikan penilaian yang belum maksimal, maka tetap diperlukan upaya evaluasi dan upaya pencegahan terhadap adanya pungutan liar (pungli) pada pelaksanaan pelayanan.

5. Tidak ada percaloan atau perantara tidak resmi pada unit layanan ini.

**Info:** Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai.

**Diagram 11. Rata-Rata Nilai pada Pernyataan 5 dalam Kuisisioner SPAK**



**Tabel 13. Jumlah dan Persentase Nilai pada Pernyataan 5 dalam Kuisisioner SPAK**

NIALI	JUMLAH	PERSENTASE
Sangat Tidak Setuju	0	0,00%
Tidak Setuju	0	0,00%
Kurang Setuju	0	0,00%
Setuju	0	0,00%
Sangat Setuju	1	20,00%
Sangat Setuju Sekali	4	80,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>
<b>RATA-RATA NILAI</b>	<b>5,8</b>	

Tingkat Persepsi Anti Korupsi pada unsur tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada pelayanan ini berada pada angka **3,87** dari interval 1-4 yang berarti masuk pada kategori **A (Sangat Baik)** dengan kinerja **Bersih dari Korupsi**. Berdasarkan Tabel 13 tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden (80% atau 4 responden) memberikan nilai 6 pada pernyataan "Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada pelayanan". Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sebagai pengguna layanan menganggap setuju bahwa tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Terdapat 1 (20%) responden yang memberikan Nilai 5, yang dapat diartikan bahwa aspek tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada pelayanan masih tetap perlu ditingkatkan.

Secara umum, hasil penilaian responden pada Pernyataan Kelima dalam Kuisioner SPAK tersebut sudah Sangat Baik, akan tetapi oleh karena masih terdapat 1 responden yang memberikan penilaian yang belum maksimal, maka tetap diperlukan upaya peningkatan pencegahan terhadap percaloan/perantara tidak resmi pada pelayanan.

### **C. Tindak Lanjut Hasil Survei**

Berdasarkan pada uraian dan sajian Analisis Hasil Survei tersebut, diperoleh Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu **3,76** atau **94%** yang termasuk dalam kategori mutu **(A) Sangat Baik** dengan kinerja **Bersih dari Korupsi**. Walaupun telah diperoleh nilai yang Sangat Baik, akan tetapi terdapat beberapa catatan analisis yang harus menjadi perhatian dalam melaksanakan peningkatan layanan, agar pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya semakin optimal dan Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsinya dapat dipertahankan atau meningkat.

Tindak Lanjut tersebut juga diperlukan untuk mewujudkan komitmen Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjadi Wilayah yang Bersih dari Korupsi sebagai bagian dari upaya Reformasi Birokrasi yang salah satu tujuan adalah mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Tindak Lanjut yang harus dilaksanakan berdasarkan pada analisis hasil Survei Persepsi Anti Korupsi yang diuraikan sebelumnya, yaitu meningkatkan kepedulian dan kesadaran Aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terhadap Anti Korupsi yaitu dengan secara berkala melakukan internalisasi Anti Korupsi dan konsekuensi atas dilakukannya tindakan yang bersifat koruptif di Pengadilan.



**BAB IV**  
**DATA SURVEI**

**A. Data Responden**

**Tabel 14. Data Kuisisioner Isian Responden Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)**

**Tabel Data Kuisisioner Isian Responden**  
**Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadalan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Triwulan II Tahun 2023**  
**(Periode Survei: April – Juni)**

No.*	UNSUR PENIALAIAN **					IDENTITAS RESPONDEN						JENIS PELAYANAN	
	1	2	3	4	5	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	No. Tlp./HP		Alamat E-Mail
1.	6	6	5	6	6	Sodik, SH CBL	L	41	S1	ADVOKAT	081327170925	odik.law@gmail.com	Penyelesaian Perkara
2.	6	6	6	6	6	Gilang Ginanjar	L	35	S1	ADVOKAT	085224693659	advokatgilangginanjar@gmail.com	Penyelesaian Perkara
3.	6	6	6	6	6	Yenni Azyra P.	P	26	S1	PNS/ASN	082124188829	yenniazyra29@gmail.com	Penyelesaian Perkara
4.	6	6	6	6	6	hevi wj	P	34	S1	PNS/ASN	082220656752	-	Penyelesaian Perkara
5.	5	4	4	4	5	T.P. Hasugian	L	54	S1	PNS/ASN	081332373933	tigorparlilitan@gmail.com	Informasi & Pengaduan

**Keterangan :** \* Kolom Nomor (No.) menunjukkan urutan dan jumlah Responden yang mengisi Kuisisioner.

\*\* Kolom Unsur Penilaian merupakan jumlah Nilai yang diberikan oleh Responden dalam Kuisisioner terhadap setiap Unsur Penilaian Survei Persepsi Anti Korupsi. Unsur-unsur Penilaian tersebut yaitu:

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

**Info:** *Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena factor (suku, agama, kekerabatan, almameter, dan sejenisnya).*

2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

*Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyebortan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.*

3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

*Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parsel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan prgan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.*

4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

*Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli bias dikamufasekan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terimakasih", dsb).*

5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

*Info: Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai.*

## B. Keputusan Pembentukan Tim Survei



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA  
NOMOR : W3-TUN/ 289 /KP.04.6/1/2023**

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI KORUPSI  
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  - b. Bahwa dalam rangka Penguatan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, maka perlu dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Dan Persepsi Korupsi bagi Masyarakat Pencari Keadilan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
  - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
  - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  - c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - d. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - e. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  - g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
  - h. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/III/2012 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
  - i. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**
- Pertama** : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, untuk menjadi Tim Survei Kepuasan Masyarakat Dan Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
- Kedua** : Tim Survei Kepuasan Masyarakat Dan Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertugas :
- 1. Mengidentifikasi jenis layanan yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
  - 2. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat Dan Persepsi Korupsi secara periodik;

Menganalisis .....

3. Menganalisis hasil survei sebagai rekomendasi perbaikan;
4. Membuat laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dan Persepsi Korupsi secara berkala dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 31 Januari 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di - Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TLN Mahkamah Agung RI, di - Jakarta;
3. Arsip.

Daftar Lampiran

keputusan ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya  
Nomor W3.TUN/2024/JKH/04/6/2023  
Tanggal 31 Januari 2023

**TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI KORUPSI  
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI KORUPSI	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1	1	1	1
1	Koordinator	RINI SETIAWATI, S.E NIP. 19750929 200604 2 002	Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian
2	Sekretaris	MAULANA BINTANG BAHARI, S.A.P. NIP. 19950527 201903 1 004	Analisis Kepegawaian Pertama
3	Anggota	1. EDI SUPRIAJI, A. Ma., S.H., M.H. NIP. 19750507 200003 1 002	Panitera Muda Perkara
		2. MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H. NIP. 19640204 198603 1 005	Panitera Muda Hukum
		3. MOH HAIRIL ANWAR, S.Kom., M.H. NIP. 19830429 200604 1 002	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI

